



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 180/53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 180/14 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Gubernur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/14 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya terkait Indikator Kinerja Utama, Roadmap Sanitasi Provinsi, Perubahan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/14 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/14 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/14 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 180/53 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 180/14 TAHUN 2024
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Rancangan Peraturan Gubernur ajuan Perangkat Daerah			
1.	Verifikasi Dokumen Yang Lengkap Dan Sah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan Dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.		Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.		-
4.	Sensus Barang Milik Daerah.		-
5.	Kodefikasi Barang Milik Daerah.		-

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Tata Cara Pemanfaatan Tanah Dan Pemberian Rekomendasi Pada Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.		Mengatur mengenai Pemanfaatan Tanah dan Pemberian Rekomendasi pada Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah di Kawasan PRPP.
7.	Penghapusan Piutang.		-
8.	Jogo Tonggo.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Dasar Surat Permohonan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah.
9.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.		Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
10.	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
11.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.		Tindak Lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
12.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan perubahan kriteria modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; b. Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) huruf a Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Ditujukan sebagai media pencatatan dan pelaporan realisasi investasi penanaman modal bagi sektor usaha mikro yang tidak tercatat dalam sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagai upaya meningkatkan realisasi investasi penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.
14.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.		<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem <i>online single submission risk based approach</i> (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>b. Regulasi terkait dengan perizinan berusaha berkembang sangat dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian dengan regulasi perizinan terbaru;</p> <p>c. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah ditujukan sebagai media pemrosesan perizinan berusaha yang dilaksanakan di luar sistem OSS RBA sehingga memungkinkan terjadi disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan.</p>
15.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana.
16.	Mitigasi Bencana Pada Daerah Pesisir Dan Pulau Terluar (Penanganan Banjir Rob/Banjir Pesisir).		Menyesuaikan regulasi mitigasi bencana daerah pesisir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Dokumen Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan/Atau Limbah B3 Skala Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18.	Penggunaan Belanja Tak Terduga Untuk Penyediaan Logistik Dan Sarpras Penanganan Darurat Bencana.		Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
19.	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Untuk Penyediaan Logistik Dan Sarpras Penanganan Darurat Bencana.		Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
20.	Pedoman Pemerintah Daerah tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.		Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
21.	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
22.	Rencana Aksi Daerah (RAD)Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah.		Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
23.	Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.		Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
24.	Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Untuk memperlancar proses permohonan Hak Pakai atas tanah aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
25	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.
26.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Air Limbah Domestik.		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Air Limbah Domestik.
27.	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Petunjuk Teknis Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
28.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.
29.	Perubahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan menyesuaikan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
30.	Penentuan Nilai Perolehan Air di Jawa Tengah.		Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka penyesuaian perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi.
31.	Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan/amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			tahun 2024.
32.	Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		Pelaksanaan/amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
33.	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.		Pelaksanaan/amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
34.	Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintahan Provinsi.		
35.	Pedoman Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		
36.	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	-
37.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan dengan perkembangan beberapa layanan manajemen informasi yang telah terintegrasi.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
38.	Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
39.	Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.		Kebijakan Kepala Daerah.
40.	Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.		Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri.
41.	Perubahan Tarif Retribusi Daerah.		Pertimbangan kondisi terkini.
42.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.		Dalam rangka pelaksanaan urusan bidang keuangan sub bidang pendapatan.
43.	Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.		Kebijakan Kepala Daerah.
44.	Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Perubahan menyesuaikan kenaikan tarif.
45.	Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.		Perubahan menyesuaikan kenaikan Standarisasi Honorarium.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
46.	Peraturan Organisasi Rumah Sakit (<i>Corporate By Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.		Perubahan Nomenklatur Rumah Sakit.
47.	Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.		Perubahan menyesuaikan kondisi saat ini.
48.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C.
49.	Retribusi Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
50.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut peratura perundang-undangan yang lebi tinggi: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Kesehatan. 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarno Provinsi Jawa Tengah.
51.	Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Mengatur Pedoman terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
52.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.		Mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta target waktu pencapaiannya.
53.	Klasifikasi Arsip Di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/8557/SJ tanggal 30 November 2022 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
54.	Penyaluran Belanja Subsidi Harga Pangan Strategis Di Tingkat Konsumen.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Mendukung pelaksanaan program penurunan inflasi daerah di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan intervensi harga di tingkat konsumen melalui belanja subsidi harga pangan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
55.	Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut PermenPANRB No. 7 Tahun 2022.
56.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Provinsi Jawa Tengah.		Menyesuaikan perkembangan keadaan khususnya peraturan perundang-undangan.
57.	Pembentukan Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Jawa Tengah Tipe B.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Pembentukan Rumah sakit baru yaitu Rumah Sakit Mata, 15syste dan sumber daya manusia peralihan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Balai Paru dan Balkesmas).
58.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.		Melaksanakan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem kesehatan Provinsi.
59.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah.	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
60.	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.		Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.
61.	Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
62.	Tunjangan Risiko Dan Insentif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
63.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Penyesuaian setelah ditetapkannya : a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
64.	Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan/Stau Termasuk Di Dalam Appendix CITES.		Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
65.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.		Tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
66.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.		Adanya perubahan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, perubahan susunan perangkat daerah dan meningkatnya perhatian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari.
67.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren.	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren.
68.	Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	-
69.	Pengelolaan Keuangan Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Menengah Negeri.		-

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
70.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Tindak Lanjut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.
71.	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak Lanjut Permen PANRB No. 7 Tahun 2022.
72.	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
73.	Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.
74.	Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Tindak lanjut Permendagri Nomor 11 Tahun 2020.
75.	Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.		Tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.
76.	Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	-

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
77.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.		Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.
78	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah.		Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
79.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan Dan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan Dan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
80.	Rencana Aksi daerah Penyandang Disabilitas.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi : 1. PP No 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 2. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 3. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
81.	Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Jawa Tengah.		Hasil Riset
82.	Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim Jawa Tengah Tahun 2023-2030.		Amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
83.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.		Penyesuaian dengan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
84.	Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2014-2026.		1. Memenuhi amanat Perpres 111/Th 2022; 2. Menyesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan jangka menengah RPD 2024-2026; 3. Pergub tentang RAD SDGs 2019-2023 sudah habis masa berlakunya.
85.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2030.		1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			tentang tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020.
86.	Rencana Induk Pengelolaan Geopark.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.15 Tahun 2020 Pasal 12 (1.b) bahwa Rencana Induk Pengembangan Geopark diatur oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dalam hal wilayah Geopark meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; 2. Aspiring Geopark Dieng terdiri dari dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
87.	Peraturan Gubernur Tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan dokumen perencanaan jangka menengah RPD 2024-2026. 2. Pergub 60 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 sdh habis masa berlakunya. 3. Amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
88.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah.	Biro Infrastruktur dan sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah.
89.	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.		Tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
90.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.	Amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen.
91.	Pengelolaan Data Terpadu Jawa Tengah.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
92.	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera.		Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera.
93.	Tambahkan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tidak lanjut penetapan.
94.	Jawa Tengah <i>Corporate University</i> .	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sesuai Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan 23system pembelajaran terintegrasi (<i>corporate university</i>).
95.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak Lanjut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
96.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.		Tindak Lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
97.	Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.	Tindak lanjut ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
98.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.*	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
99.	Standar Harga.*	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
100.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.*	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
101.	Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) Jawa Tengah.*	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
102.	Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024-2030.*	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.	Tindak lanjut ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
103.	Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan darurat, Keperluan Mendesak dan Bantuan Sosial Tidak Terencana.*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Guna melaksanakan ketentuan BAB II Huruf Dangka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
104.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.*	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Perubahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
105.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo.*	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo.	Kenaikan kelas Rumah Sakit Umum, dari semula kelas B ke Kelas A.
106.	Perubahan Pergub Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.*	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penyesuaian aspirasi dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
107.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029.*	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
108.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.*	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
109.	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
110.	Kelas Jabatan.*	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
111.	Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah Annur Kabupaten Magelang.*	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR YANG MERUPAKAN KUMULATIF TERBUKA

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut pelaksanaan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.		
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.		
4.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.		
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO